

PENDEPORTASIAN TKI DARI MALAYSIA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEDUA NEGARA

Mira Andriani

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract: This study aims to determine the causes of deportation of migrant workers from Malaysia, knowing the implications of deportation of TKI to the two countries in the field of Economic, Social, Political and Security as well as to find a method in overcoming the deportation of Indonesian Workers. The method used in this research is descriptive. This method aims to illustrate the relationship between one phenomenon with another, and then concluded. This method can certainly explain the causes of deportation of Indonesian labor migrants from Malaysia, knowing the implications of deportation of labor migrants to the two countries in Economic, Social, Political and Security and to Find methods to overcome deportation of Indonesian Workers. The research concludes that there are some things that cause a foreigner to be deported, in addition to his unwanted existence, which is feared threatening and disturbing the stability of the unity of a country, as well as if the foreigner committed a crime or violation of the law in particular In the field of immigration. The deportation has an impact on Indonesia and Malaysia, especially in the economic field. Social, political and security issues.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebab-sebab penempatan TKI dari Malaysia, mengetahui implikasi-implikasi dari penempatan TKI terhadap kedua negara dalam bidang Ekonomi, Sosial, Politik dan keamanan serta untuk menemukan metode dalam mengatasi penempatan TKI dari Malaysia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Metode ini bertujuan menggambarkan hubungan antara satu fenomena dengan fenomena lainnya, kemudian diambil kesimpulan, Metode ini tentunya dapat menjelaskan sebab-sebab penempatan TKI dari Malaysia, mengetahui implikasi-implikasi dari penempatan TKI terhadap kedua negara dalam bidang Ekonomi, Sosial, Politik dan keamanan serta untuk menemukan metode dalam mengatasi penempatan Tenaga kerja Indonesia. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Ada beberapa hal yang menyebabkan seorang warga asing harus di deportasi, selain karena keberadaannya yang sudah tidak dikehendaki atau disukai lagi, yang nantinya dikhawatirkan dapat mengancam dan mengganggu stabilitas kesatuan suatu negara, juga apabila orang asing tersebut melakukan kejahatan ataupun pelanggaran hukum khususnya di bidang keimigrasian. Penempatan tersebut mempunyai dampak bagi Indonesia dan Malaysia terutama di bidang ekonomi. sosial, politik dan keamanan.

Kata Kunci: deportasi, Malaysia, TKI, implikasi

PENDAHULUAN

Tenaga Kerja di Indonesia (TKI) adalah salah satu penggerak tata kehidupan ekonomi dan merupakan sumber daya yang jumlahnya cukup berlimpah. Hal ini dapat dilihat dari masih tingginya jumlah pengangguran di Indonesia serta rendahnya atau minimnya kesempatan kerja yang disediakan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan meningkatnya pengangguran di Indonesia, yaitu: 1) Terjadinya krisis ekonomi sehingga menyebabkan menurunnya kegiatan usaha dan investasi asing, 2. Banyaknya perusahaan yang mengalami kebangkrutan karena utang dalam negeri atau luar negeri membesar akibat lemahnya rupiah. Salah satu dampak lain krisis moneter adalah ketidakmampuan perusahaan membeli bahan baku luar negeri. Menurunnya permintaan

masyarakat akan barang dan jasa sehingga banyak perusahaan yang gulung tikar atau mencegah kerugian yang lebih besar sebagian pengusaha mengurangi produksi dan mengurangi jumlah tenaga kerjanya, dan 3. Laju pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja tiap tahun sebesar 1,7 juta orang.

Masalah kesempatan kerja semakin penting dan mendesak, karena diperkirakan pertumbuhan angkatan kerja lebih cepat dari pertumbuhan kesempatan kerja. Hal ini mengakibatkan tingkat pengangguran yang semakin meningkat, lebih-lebih dalam krisis ekonomi yang melanda Indonesia yang ditandai dengan penyerapan angkatan kerja yang sangat sedikit, tingginya angka pemutusan hubungan kerja dan nilai tukar rupiah yang cenderung melemah. Adanya ke-

terbatasan lapangan kerja dan kondisi perekonomian yang kurang menarik di negaranya sendiri dan penghasilan yang cukup besar dan yang tampak lebih menarik di negara tujuan telah menjadi pemicu terjadinya mobilitas tenaga kerja secara internasional Migrasi adalah langkah alternatif yang diambil individu sebagai upaya untuk mengubah kualitas kehidupannya atas keterbatasan akses ekonomi dan distribusi kesempatan ditingkat domestik.

Demikian halnya dengan migrasi TKI ke luar negeri yang sudah berlangsung sejak 1970-an dan terus mengalami peningkatan dalam jumlahnya. Meningkatnya TKI ke luar negeri tidak bisa dipisahkan dari kondisi pertumbuhan angkatan kerja dan ketersediaan lapangan pekerjaan domestik. Ada dua faktor pendorong Pemerintah mengambil kebijakan pengiriman TKI keluar Negeri, pertama, semakin kompleksnya masalah kependudukan yang terjadi didalam negeri dengan berbagai implikasi implikasi sosial ekonominya, seperti masalah pengangguran, menyebabkan harus ditempuh langkah-langkah inovatif untuk berusaha mengurangi tekanan masalah tersebut, kedua, terbukanya kesempatan kerja yang cukup luas di negara lain dapat menyerap TKI dalam jumlah yang cukup besar. Kesempatan kerja tersebut selain dapat menyerap tenaga kerja yang menawarkan tingkat penghasilan dan fasilitas menarik dibandingkan kesempatan kerja dalam negeri

Penempatan TKI keluar negeri hanya dapat dilakukan ke negara tujuan yang Pemerintahnya telah membuat perjanjian tertulis dengan Pemerintah Republik Indonesia atau ke negara tujuan yang mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing. Hal ini dapat dipahami bahwa betapa pentingnya perjanjian bilateral dalam hal penempatan TKI keluar negeri untuk melindungi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri, sesuai dengan asas "*Pacta Sunt Servanda*" Perjanjian yang sudah disepakati berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang menyelenggarakan.

Kebanyakan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia berketerampilan rendah dan semi trampil dan umumnya menempati kerjaan yang bahaya, kotor (atau disebut juga "3D")

disektor domestik sebagai penata laksana rumah tangga pekerjaan yang tidak diminati oleh sebagian besar warga negara Malaysia karena kecilnya gaji yang ditawarkan. SDM yang tidak memadai dan skill yang kurang justru menyebabkan permasalahan ketika para TKI sudah sampai ditempat tujuan.

Malaysia dengan penduduk melayu sebagai penduduk asli sangat kekurangan tenaga-tenaga yang mampu bekerja disektor-sektor pekerja berat dan kasar, dimana pekerjaan itu dilakukan dengan upah yang sangat murah. Penduduk asli Malaysia tidak meminati pekerjaan seperti ini, mereka lebih cenderung memilih pekerjaan yang relatif tidak berat dengan gaji yang lebih besar. Dengan demikian Malaysia dalam berbagai sektor pembangunannya memerlukan tenaga kerja asing. Kebergantungan Malaysia terhadap pekerja asing khususnya di sektor konstruksi banyak menimbulkan permasalahan dari berbagai kalangan, baik dari kalangan pemerintah Malaysia maupun dari kalangan rakyat Malaysia sendiri.

Usaha pemerintah Malaysia untuk menekan lajunya pertumbuhan pekerja asing di Malaysia masih belum menampakkan hasil. Hal ini masih terlihat dari masih banyaknya pekerja-pekerja asing yang berhijrah ke wilayah Malaysia untuk mencari pekerjaan. Dalam pencarian pekerjaan tersebut, terdapat di dalamnya bagaimana proses pengiriman dan penempatan pekerja asing itu di Malaysia yang kemudian banyak menimbulkan masalah, disebabkan oleh beberapa faktor yang dibawa para pekerja asing yang bekerja di Malaysia. Faktor faktor tersebut secara tidak langsung berimbas terhadap pelaksanaan pekerjaan. Masalah-masalah yang ditimbulkan seringkali berdampak kepada pendeportasian pekerja ke negara asalnya.

Dalam mengatasi dan mengantisipasi keberadaan TKI ini maka pemerintahan Malaysia melakukan pendeportasian yang menurut kamus besar Bahasa Indonesia berarti pembuangan, pengasingan atau pengusiran seseorang keluar suatu negeri sebagai hukuman atau karena orang itu tidak berhak tinggal disitu. Dan juga pemerintah Malaysia telah mengeluarkan aturan keimigrasian baru yakni Akta Imigresen 1954/1963 yang memuat tentang sanksi baru terhadap

keberadaan tenaga kerja. Sangsi tersebut berupa maksimal 6 kali cambuk ditambah 5 tahun penjara atau denda hingga 10.000 (setara dengan 24 juta rupiah). Aturan baru ini mulai diberlakukan semenjak 1 Agustus 2002 yang lalu.

Tindakan deportasi ini didalam hukum internasional diakui sebagai kewenangan ataupun kekuasaan dari masing-masing negara yang berdaulat. Hal ini diperkuat oleh pendapat J.G starke di dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Internasional, dimana ia menyatakan bahwa di dalam buku hukum internasional itu sendiri memberikan hak dan kekuasaan kepada negara-negara di dunia untuk melakukan deportasi dan mengusir orang asing kembali ke negara asalnya, dengan ketentuan sepanjang tidak melanggar Hak Azazi Manusia (HAM).

METODE

Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif, yakni penelitian yang bertujuan menggambarkan hubungan antara satu fenomena dengan fenomena lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah teknik pengumpulan data sekunder yang sering disebut dengan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mengumpulkan data, memilih bahan-bahan yang relevan dan mendukung dari perpustakaan berupa : buku-buku, literatur, majalah-majalah, surat kabar, jurnal, buletin, media elektronik, dokumentasi serta sumber media lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

Pada metode ini batas waktu penelitian diadakan antara tenggang waktu semenjak konfirmasi yang diberikan pemerintah Malaysia tentang akta Imiggressen 1954/1963 sampai setelah proses pendeportasian TKI dari Malaysia. Rentang waktu ini dapat lebih fleksibel mengingat fenomena yang diteliti peneliti sudah terjadi, sehingga batasan waktunya dapat diambil dalam waktu menurut kebutuhan penelitian. Mengingat penelitian ini sangat kompleks dan tidak mungkin bagi penulis membahas secara keseluruhan. Oleh karena itu penulis sengaja membatasi dan membuat ruang lingkup penelitian ini dalam lingkup yang terbatas, dengan harapan agar analisa yang dikemukakan lebih rinci dan

terarah sesuai dengan kaedah ilmiah. Penelitian ini terbatas dan terfokus pada pembahasan implikasi pendeportasian TKI dalam bidang ekonomi, politik, sosial keamanan bagi Indonesia dan Malaysia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebab-sebab Pendeportasian TKI dari Malaysia

Persoalan deportasi muncul merupakan akibat dari kurangnya perhatian Pemerintah Indonesia dalam pengelolaan penempatan dan perlindungan buruh migran. Besarnya biaya penempatan yang harus ditanggung calon buruh migran Indonesia membuat mereka memilih cara ilegal untuk masuk ke negara tujuan seperti Malaysia.

Krisis moneter telah memicu meningkatnya jumlah TKI di Malaysia. Semenjak UU keimigrasian Malaysia terbaru diberlakukan, mengalirkan gelombang pengungsi besar-besaran dari Malaysia. Ratusan ribu imigran keluar Malaysia karena ancaman hukuman penjara maksimal 6 bulan, cambuk sebanyak maksimal 6 kali dan membayar denda. Selama Pemerintah tidak mampu menyelesaikan persoalan krisis kesejahteraan dan penyediaan lapangan kerja di dalam negeri, upaya pencegahan migrasi tenaga kerja produktif ke Malaysia merupakan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan

Faktor lain terjadinya deportasi oleh pemerintah Malaysia adalah masalah keimigrasian, ada yang sudah bekerja dengan izin resmi namun tidak pulang ke Indonesia sewaktu masa kontraknya habis. Secara umum ada beberapa perilaku yang mencuat dalam masyarakat Malaysia sehingga menjadi pemicu terjadinya permasalahan terhadap TKI. Pertama, di sisi masyarakat atau majikan. Walaupun ada terminologi budaya serumpun Melayu akan tetapi pertumbuhan ekonomi yang pesat telah memperlebar pemerataan kesejahteraan kelas ekonomi menengah memunculkan perilaku OKB (Orang Kaya Baru). Mereka yang menjadi majikan TKI terutama yang bekerja di sektor domestik cenderung angkuh dan kasar. Ini dipengaruhi pula oleh rendahnya demokrasi di Malaysia karena sistem pemerintahan kerajaan sehingga masih membudaya

sikap menganggap pelayan atau pekerja/buruh kasar seperti budak. Tidak heran bila perlakuan kasar dan biadab majikan di Malaysia acap menjadi laporan media internasional.

Kedua, adanya di level penyalur jasa/kerja. Tindakan penipuan mau untung sendiri seperti layaknya banyak penyalur pekerja di Indonesia menjadi pemicu munculnya TKI ilegal. Ketiga, di sektor pemerintah Malaysia yang menganggap bahwa besarnya jumlah tenaga kerja asing telah menjadi ancaman keamanan negara. Malaysia menuding banyak kasus kriminal dilakukan TKI, namun yang terlihat adalah justifikasi atau pembenaran pemerintah terhadap sikap warga negaranya untuk memperbudak TKI (seperti tidak membayar gaji, tidak menghukum majikan yang menganiaya)

Implikasi Pendeportasian TKI bagi Indonesia ***Implikasi dalam bidang ekonomi***

1. Menambah masalah pengangguran

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan 1997 menyebabkan runtuhnya sektor ekonomi skala besar, properti, perbankan hingga usaha kecil, krisis ini diikuti dengan PHK secara besar-besaran. 20 juta orang mengalami PHK, sehingga terjadinya penambahan pengangguran, tidak terjadi peluang untuk kesempatan kerja baru dalam kondisi ekonomi yang stagnan dan pemulihan ekonomi ini berjalan lambat dari tahun ketahun. APBN tidak cukup merangsang munculnya lapangan kerja baru.

Indonesia termasuk dalam negara dengan tingkat pengangguran paling tinggi di dunia. Menakertrans mengungkapkan jumlah pengangguran di Indonesia melebihi jumlah populasi penduduk Malaysia. Para TKI ini mudah untuk kembali ke Malaysia karena nilai tawar para TKI ini dianggap lebih tinggi, para TKI dikenal sebagai pekerja yang ulet, tekun dan jujur.

Kembalinya TKI yang terdeportasi yang berstatus pengangguran menambah deretan penganggur dalam negeri. Meningkatnya pengangguran ini secara kuantitas memang bersifat sementara, mengingat kesulitan pendataan jumlah pengangguran pasca kepulangan TKI ke Indonesia, disamping kemungkinan besar mereka akan kembali ke Malaysia. Namun mengingat

MoU antara Indonesia dan Malaysia yang masih terus digodok para TKI ini belum segan akan kembali ke Malaysia

Pendeportasian ini akibat kebijakan pemerintah Malaysia untuk mengurangi jumlah TKI. Kepulangan TKI membuat Menakertrans merasa sangat khawatir dengan kondisi lapangan kerja di Indonesia yang semakin sempit, karena peristiwa ini bertolak belakang dengan rencana Menakertrans dalam memprioritaskan pengiriman TKI ke luar negeri untuk mengurangi jumlah pengangguran di dalam negeri.

2. Berkurangnya penerimaan negara

Pendapatan yang diperoleh TKI adalah sumber dana yang amat penting bagi negara, penerimaan devisa yang berasal dari TKI terdaftar (legal) menunjukkan signifikansi TKI bagi sumber devisa Indonesia. Terlebih lagi dana yang berasal dari TKI ilegal dengan jumlah jauh lebih banyak dibanding TKI legal, disamping itu mereka juga memperoleh pendapatan yang jauh lebih besar dari TKI legal akibat ketiadaan pungutan atau iuran yang harus mereka bayar. Remitten yang diterima daerah asal TKI menjadi sumber pendapatan penting bagi daerah asal TKI yang umumnya mencakup daerah pedesaan.

Pendeportasian TKI ini secara tidak langsung juga berdampak pada perolehan dana yang diterima daerah asal TKI. Hasil kegiatan TKI diluar negeri telah menjadi sumber penting gerak perekonomian masyarakat pedesaan khususnya daerah asal TKI. Selain berkurangnya pendapatan negara, setiap pemda daerah transit TKI juga harus mengeluarkan dan yang tidak sedikit untuk menyediakan fasilitas bagi TKI di penampungan. Disamping itu juga diterima bantuan dari Pemda daerah transit, LSM dan organisasi kemasyarakatan ikut berpartisipasi menyumbangkan bantuannya pada TKI.

Implikasi dalam bidang sosial

Pemulangan TKI dalam jumlah yang besar sangat berdampak terhadap faktor Ekonomi, Politik, Sosial dan Keamanan terhadap kedua negara khususnya Indonesia karena dapat menambah masalah pengangguran di Indonesia. Sedangkan bagi Malaysia dengan mempekerjakan para TKI dapat merugikan Pemerintah

Malaysia baik dari faktor ekonomi, sosial, politik dan keamanan, selain itu terganggunya perekonomian Malaysia dalam produksi perkebunan, proyek konstruksi dan sektor jasa yang akan mengakibatkan berkurangnya devisa negara bagi Malaysia.

Dalam bidang Sosial, banyak persoalan yang ditimbulkan pada saat pendeportasian maupun sesudahnya persoalan tersebut antara lain : tindak kriminalitas oleh dan terhadap TKI, munculnya trauma psikologis bagi TKI, dan masalah sosial lain seperti penyebaran penyakit, kekurangan gizi, kematian, terlantarnya pendidikan anak TKI, dll

1. Rawannya tindak kriminalitas

Pendeportasian TKI membuat persoalan bagi TKI dan keluarganya, banyak aksi kriminalitas atau sekadar ancaman mengintai para TKI. Para TKI umumnya mengalami pelecehan seksual, pemaksaan penukaran valas, kekerasan fisik serta penipuan. Pemerintah selaku pihak yang bertanggung jawab terhadap para TKI atas kepentingan warga negaranya pada faktanya memperlihatkan kurangnya komitmen terhadap masalah TKI ini.

2. Terjadinya trauma psikologis

TKI yang telah kehilangan nilai kemanusiaannya akibat terusir tanpa terhormat dari Malaysia, harus berhadapan dengan situasi dalam negeri yang memaksa mereka menjadi korban eksploitasi. Akibatnya tidak berlebihan untuk menyebutkan para pengungsi nunukan sebagai sekumpulan individu yang telah mengalami paling sedikit—viktimsasi kedua (*revictimization*) dengan begitu sempurna. Gambaran umum kondisi korban viktimsasi ini adalah individu yang kehilangan harta benda, diterpa oleh kesakitan, membutuhkan berbagai pertolongan, serta bentuk ketidakberdayaan lainnya.

Efek psikologis negatif ini terlihat pada gejala penyakit kejiwaan yang diderita sebagian TKI. Dalam ilmu kedokteran terdapat beberapa penyakit kejiwaan yang harus ditangani serius antara lain depresi, epilepsi, skizofrenia. Depresi dan skizofrenia adalah penyakit yang kerap diderita oleh sebagian besar TKI dan keluarganya di penampungan.

3. Masalah-masalah sosial lainnya

Ribuan anak TKI menderita kekurangan gizi dan busung lapar. Kondisi di Nunukan dalam keadaan darurat saluran air dan jamban yang sangat minim serta bau tidak sedap, jika kondisi ini segera ditangani wabah penyakit akan menancam seperti diare, tifus khususnya pada balita. Menurut Tim Krisis Center yang didatangkan ke Nunukan kurangnya air bersih adalah kendala utama para TKI di penampungan khususnya di Nunukan. Konsorsium pembela Buruh Migran Indonesia (KOPBUMI) menyatakan akibat arus deportasi massal tersebut diperkirakan sekitar 70 ribu TKI yang tidak berdokumen di Kabupaten Nunukan Kalimantan Timur hidup terkatung-katung, Para TKI yang kelaparan tanpa uang dipaksa tidur berdesak-desakan tidur di Mesjid, Gereja, dan emperan toko. Di Batam, Pemda setempat malah menolak puluhan ribu TKI yang di deportasi Pemerintah Malaysia. Menurut Sekretaris kota Batam, 4 ribu Tki sudah dipulangkan ketempat asal masing-masing, sementara 80 ribu lainnya yang akan di deportasi melalui Batam dipastikan akan ditolak.

Implikasi Pendeportasian TKI terhadap Malaysia

Pertumbuhan yang cepat pada dasawarsa terakhir ini menyebabkan terjadinya penyerapan tenaga kerja yang besar di berbagai sektor ekonomi di Malaysia, tidak mengherankan bila saat ini Malaysia mencapai tahap “*a full employment level*” atau dengan kata lain tingkat pengangguran di Malaysia adalah nol persen. Adanya pengangguran saat ini bukan disebabkan karena tidak memperoleh pekerjaan, namun karena memilih pekerjaan yang lebih baik dan upah yang lebih tinggi.

Implikasi dalam bidang ekonomi

TKI di Malaysia telah menjadi bagian penting berbagai sektor perekonomian di Malaysia. Pasca pendeportasian TKI ditandai dengan kebutuhan Malaysia yang besar terhadap tenaga kerja asing. Masyarakat pribumi di Malaysia tidak bisa menggantikan posisi yang selama ini diisi oleh TKI. Kebutuhan ini diikuti oleh menurunnya volume ekspor sawit asal Malaysia, dan akan berujung pada kemerosotan perekonomian Malaysia.

Kekuatan ekonomi Malaysia terutama digerakkan oleh sektor ekspor minyak sawit, pasca pendeportasian TKI yang selama ini bekerja pada perkebunan kelapa sawit berdampak dengan menurunnya volume ekspor sawit dengan demikian devisa yang masuk ke kas negara akan berkurang.

Kelangkaan bahan-bahan makanan tertentu ikut terjadi di Malaysia. Masa tenggang waktu hingga pemberlakuan UU imigrasi Malaysia, sayur-sayuran menjadi langka di Malaysia. TKI yang telah terdeportasi berperan besar dalam proses produksi dan distribusi sayur-sayuran di Malaysia. Kepulangan mereka mengakibatkan sebagian besar masyarakat Malaysia untuk sementara harus mengonsumsi sayur-sayuran secara terbatas. Kelangkaan sayur-sayur ini menyulitkan konsumen yang terdiri dari berbagai lapisan masyarakat di Malaysia, pola konsumsi mereka terganggu.

Implikasi dalam bidang sosial

Pasca pendeportasian TKI, lapangan pekerjaan meningkat, Kebutuhan Malaysia akan TKI menjadi besar. Salah satu sektor yang paling berpengaruh di Malaysia yakni sektor manufaktur, sektor ini melesat tumbuh karena tingginya permintaan domestik dan luar negeri. Sektor manufaktur ini mempekerjakan hampir 60 persen TKI, selain manufaktur, sektor perkebunan terutama kelapa sawit juga merupakan kekuatan ekspor Malaysia.

Implikasi dalam bidang politik

Berbagai aksi demonstrasi bermunculan dari Indonesia yang menentang Pemerintah Malaysia mengeluarkan UU keimigrasian. Bahkan para demonstran melakukan aksi pembakaran terhadap bendera Malaysia. Amnesti Internasional menganggap hukuman cambuk ini sebagai hukuman yang menghina harkat dan martabat manusia.

Pendeportasian ini juga mengakibatkan ketegangan hubungan antara Indonesia dan Malaysia yang ditandai dengan kecaman pejabat RI terhadap Malaysia yang tidak manusiawi karena terbukti hanya sebagian TKI yang berbuat rusuh dan menyarankan memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan memboikot artis Malaysia.

Implikasi dalam bidang keamanan

Meningkatnya kejahatan di Malaysia diakibatkan makin banyaknya warga negara asing disana. New Sunday Times, sebuah surat kabar di Malaysia menemukan fakta bahwa orang-orang Indonesia adalah orang-orang yang paling dicari di Malaysia karena sebagian besar mereka adalah TKI ilegal. Masyarakat Malaysia sangat terganggu oleh kejahatan orang-orang asing, terutama Indonesia.

Pasca pendeportasian TKI diakui oleh Pemerintah Malaysia bahwa berangsur-angsur mulai tercipta ketenangan, masyarakat Malaysia tidak khawatir lagi dengan ancaman dan gangguan oleh orang-orang Indonesia. Pendeportasian TKI mengembalikan ketenangan masyarakat Malaysia. Pasca pendeportasian TKI, masyarakat Malaysia tidak khawatir lagi dengan ancaman gangguan oleh orang-orang Indonesia yang ditandai dengan minimnya tindak kriminalitas di Malaysia.

Metode Mengatasi Pendeportasian TKI

Ada sejumlah permasalahan yang dihadapi TKI yang pulang ke Indonesia. Pertama, berkaitan dengan status mereka sebagai TKI legal dan ilegal. Ada TKI masuk dan keluar Malaysia secara legal, ada pula yang masuk secara legal namun keluar menjadi ilegal, dan juga masuk keluar secara ilegal. Permasalahan lainnya terkait dengan perpanjangan kontrak kerja, sistem pendeportasian, dan praktik pungutan liar serta penipuan sekembali menjejalkan kaki di tanah air baik melalui pelabuhan udara, laut dan darat.

Kedua, jaminan perlindungan dan hak-hak yang harus didapatkan TKI yang telah menyelesaikan kontraknya secara legal, jaminan asuransi bila mengalami sakit atau kematian saat bekerja juga setelah masa kontrak berakhir, perlindungan terhadap hak-hak TKI yang dipulangkan karena mengalami penyiksaan dan penganiayaan.

Ketiga, terkait dengan perlindungan negara terhadap WNI yang menjadi TKI di Malaysia baik secara legal atau ilegal lalu dipulangkan secara paksa sesuai aturan Akta Imigresen A1154/2002 di Malaysia. Terakhir, terkait dengan pelanggaran hukum, etika, moral dan penghilangan

nyawa terhadap TKI yang baru sampai di tanah air baik yang dilakukan aparat berwenang pun oleh mereka yang ingin menanggung keuntungan dari TKI.

Malaysia adalah salah satu pilihan favorit, karena didukung oleh tersedianya lebih kurang 450 ribu lowongan pekerjaan setiap tahun. Penelitian Azizah Kasim tahun 2001 mengungkapkan masyarakat Malaysia cenderung menerima tenaga kerja asing yang berasal dari Indonesia, Thailand, Filipina dan Kamboja. Hingga tahun 2001 sebanyak 73% tenaga kerja asing ini ternyata dari Indonesia. Peningkatan ini tidak lepas dari peristiwa huru hara ekonomi dan politik tahun 1997 di Indonesia sehingga memicu migrasi besar-besaran TKI ke Malaysia. Hal ini memungkinkan karena pada saat bersamaan, Malaysia berhasil melepaskan diri dari jerat krisis moneter bahkan mampu memacu pertumbuhan ekonominya melalui penggunaan tenaga kerja murah asal Indonesia yang jumlahnya ratusan ribu – bahkan sering tidak dibayar (cenderung seperti dijadikan budak).

Pemerintah kemudian turut mendorong agar terjadi peningkatan kesejahteraan melalui pengiriman TKI ke luar negeri secara legal. Hanya saja sejak periode ini TKI lebih didominasi perempuan yang berpendidikan rendah, miskin, tidak punya keahlian sehingga mudah menjadi korban penipuan dan jadi korban perdagangan manusia. Tidak dimungkiri bahwa begitu banyak migran Indonesia yang berhasil menaikkan taraf kesejahterannya setelah bekerja di luar negeri. Uang hasil bekerja dikirimkan ke kampung halamannya untuk dibelikan harta benda emas, tanah, ternak, membangun rumah, membuka usaha baru, termasuk membantu berbagai organisasi lokal. Tidak sedikit mereka yang menjadi kaya di desanya. Keadaan ini jauh lebih baik dibandingkan ketika mereka masih menjadi buruh tani terutama di pedesaan.

SIMPULAN

Ada beberapa hal yang menyebabkan seorang warga asing harus di deportasi, selain karena keberadaannya yang sudah tidak dikehendaki atau disukai lagi, yang nantinya dikawatirkan dapat mengancam dan mengganggu

stabilitas kesatuan suatu negara, juga apabila orang asing tersebut melakukan kejahatan ataupun pelanggaran hukum khususnya di bidang keimigrasian. Implikasi pendeportasian di bidang ekonomi: a. Menambah masalah pengangguran. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan 1997 menyebabkan runtuhnya sektor ekonomi skala besar, properti, perbankan hingga usaha kecil, krisis ini diikuti dengan PHK secara besar-besaran. 20 juta orang mengalami PHK. sehingga terjadinya penambahan pengangguran, tidak terjadi peluang untuk kesempatan kerja baru dalam kondisi ekonomi yang stagnan dan pemulihan ekonomi ini berjalan lambat dari tahun ketahun. APBN tidak cukup merangsang munculnya lapangan kerja baru; b. Berkurangnya Penerimaan Negara. Pendapatan yang diperoleh TKI adalah sumber dana yang amat penting bagi negara, penerimaan devisa yang berasal dari TKI terdaftar (legal) menunjukan signifikansi TKI bagi sumber devisa Indonesia. Terlebih lagi dana yang berasal dari TKI ilegal dengan jumlah jauh lebih banyak dibanding TKI legal, disamping itu mereka juga memperoleh pendapatan yang jauh lebih besar dari TKI legal akibat ketiadaan pungutan atau iuran yang harus mereka bayar. Remitten yang diterima daerah asal TKI menjadi sumber pendapatan penting bagi daerah asal TKI yang umumnya mencakup daerah pedesaan.

Kemudian implikasi pendeportasian dalam bidang sosial. Banyak persoalan yang ditimbulkan pada saat pendeportasian maupun sesudahnya persoalan tersebut antara lain : tindak kriminalitas oleh dan terhadap TKI, munculnya trauma psikologis bagi TKI, dan masalah sosial lain seperti penyebaran penyakit, kekurangan gizi, kematian, terlantarnya pendidikan anak-anak TKI, dll. Selanjutnya implikasi pendeportasian dalam bidang Politik, pendeportasian TKI mengakibatkan kecaman beberapa pejabat Indonesia, dan lembaga amnesti internasional terhadap keberadaan UU keimigrasian 2002/ Akta 1154 yang mengakibatkan rusaknya hubungan antara Malaysia dengan Indonesia. Pendeportasian ini mengakibatkan ketegangan hubungan antara Indonesia dan Malaysia.

DAFTAR RUJUKAN

- K. Sentanoe, *Pengiriman dan Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri*, Yayasan Tenaga Kerja Indonesia, Jakarta, 1998
- Hadi, Syamsul, 2008. "Sekuritisasi dan Upaya Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia". *Rekayasa*. 2008. Vol.5 p.p 741-765.
- Haning, Romdiati. 2001. "Migrasi Tenaga Kerja dari Indonesia ke Malaysia Rekrutmen dan Pengelolaan"
- Mas'oed Mochtar, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, LP3ES. Yogyakarta, 1987
- Mas'oed Mochtar, *Ekonomi Politik Internasional*, Pusat antar Universitas, Studi Sosial UGM. Yogyakarta, 1987
- Supianto, *Perlindungan Negara terhadap Tenaga Kerja Indonesia*, Naringgul, Yogyakarta, 2011
- Darwan Prints, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Salam, Alfitra, *Mahatir dan Politik Luar Negeri Malaysia*, Gramedia, Jakarta, 1992
- Heni, *Dampak Politik, Ekonomi dan Sosial TKI di Malaysia terhadap Indonesia dan Malaysia*, Pekanbaru, 2009
- Muhammad Sadli, 2005, *Masalah Tenaga Kerja Internasional (TKI) Indonesia di Malaysia*
- Hosty K.J, *Politik Internasional Kerangka Untuk Analisis*, Erlangga, Jakarta, 1988
- Rubiyanti Sri, *Kebijakan Pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam Mengatasi TKI Illegal di Malaysia*, Pekanbaru, 2010.